

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan keterkaitan antara pihak agen dan pihak prinsipal (Jensen & Meckling, 2012). Pada penelitian ini yang menjadi pihak agen (pihak yang menjalankan mandat) adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, dan prinsipal (pihak yang memberi mandat) ialah masyarakat pemerintah dimandatkan oleh rakyat untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya.

Dalam konteks pemerintahan teori agensi sering digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terjadinya *fraud*. Teori ini juga memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa *fraud* terjadi dan bagaimana menguranginya melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif (Rambe 2024). Komponen penting dalam teori ini yaitu agen (pemerintah daerah) memiliki lebih banyak informasi tentang tindakan mereka daripada prinsipal (masyarakat), sehingga menyebabkan asimetri informasi atau informasi yang tidak seimbang.

Adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal dapat memberikan peluang untuk agen menutupi atau menyembunyikan sebagian informasi kepada principal karena memiliki tujuan untuk menipu prinsipal demi kepentingan agen, seperti melakukan kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset perusahaan. Hal ini akan muncul konflik keagenan. Akibatnya, agen (pemerintah daerah) dapat membuat keputusan yang merugikan prinsipal (masyarakat) seperti kecurangan (Dewi, 2023).

Dalam pemerintahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi dalam proses pelaksanaan, sebagai prinsipal dan agen, mereka harus jelas dan transparan. Karena masyarakat memberikan tanggung jawab pengelolaan dana negara kepada lembaga pemerintahan, Menurut masyarakat, kinerja pemerintahan

dapat menghasilkan tingkat kemajuan dan pertumbuhan. Dalam teori *agency*, menurut Eisenhardt (1989), terdapat tiga dasar jenis asumsi sifat dasar manusia:

- A. (*Self interest*) pada umumnya, manusia egois atau mementingkan diri sendiri, dan mereka tidak memperhatikan kepentingan orang lain.
- B. (*Bounded rationality*) manusia memiliki akal yang terbatas untuk memahami apa yang akan terjadi di masa depan.
- C. (*Risk averse*) manusia akan selalu menghindari risiko.

Adapun hubungan antara teori agensi dengan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian penting dari cara agensi menangani masalahnya. Organisasi yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi risiko informasi asimetris dan konflik kepentingan. Hubungan antara teori *agency* dengan pengendalian internal yaitu

- Konflik kepentingan, menurut teori keagenan, ada kemungkinan konflik kepentingan terjadi antara agent dan principal. Untuk mengatasi konflik ini, pengendalian internal memberikan keyakinan bahwa agent akan bertindak sesuai dengan tujuan principal (Djumiyati et al., 2024).
- Informasi asimetri, pengendalian internal mengurangi informasi asimetrik antara direktur dan agen. Akibatnya, direktur dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kinerja agen, yang mengurangi kemungkinan direktur menyalahgunakan kekuasaan (Gudipung et al., 2024).
- Komunikasi dan monitoring, sistem pengendalian internal melibatkan komunikasi yang efektif dan pengawasan yang ketat. Ini membantu principal memantau kinerja agen dan memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur dijalankan dengan baik (Setyaningrum & Haryanto, 2024).

Hubungan antara teori *agency* dengan manajemen risiko, identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mengganggu tujuan organisasi dikenal sebagai manajemen risiko. Berikut beberapa alasan, manajemen risiko menjadi penting dalam teori keagenan:

Mengurangi Moral Hazard: Jika ada sistem manajemen risiko yang baik, agen dapat lebih bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang berisiko, sehingga kemungkinan tindakan oportunistik yang merugikan principal berkurang.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Manajemen risiko yang efektif meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan principal untuk lebih mudah mengawasi tindakan agen.
- **Pengelolaan Asimetri Informasi:** Dengan memberikan informasi yang relevan tentang potensi risiko yang dihadapi perusahaan, manajemen risiko membantu mengurangi asimetri informasi antara direktur dan agen (Lestari, 2021).

Keterkaitan *agency theory* dengan *whistleblowing system* yaitu *whistleblowing system* membantu mengatasi masalah yang muncul dari konflik kepentingan ini. Dengan memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran atau kecurangan tanpa khawatir akan dihukum, organisasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka teori agensi, tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung penerapan sistem *whistleblowing* internal yang kuat. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pegawai merasa didukung untuk melaporkan pelanggaran, dan pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan terhadap manajemen (Sari, 2023).

Selain itu juga teori keagenan ini berhubungan dengan budaya organisasi. Menurut teori keagenan, agen mungkin tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal; ini dapat mengarah pada kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan mendorong perilaku etis di antara karyawan, budaya organisasi yang kuat yang menekankan integritas dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi konflik ini (Mukoffi et al., 2023).

2.2 Pencegahan *Fraud*

Committee of Sponsoring (2013) mengatakan bahwa pencegahan kecurangan biasanya dilakukan oleh manajemen ketika mereka menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang memastikan bahwa tindakan Dewan komisaris, manajemen, dan personil telah melakukan apa yang diperlukan untuk dapat memberikan keyakinan

yang cukup untuk mencapai tiga (tiga) tujuan utama, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas, dan efektifitas operasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Penipuan pada dasarnya adalah tindakan yang disengaja melanggar norma sosial dan mengakibatkan kerugian finansial kepada orang lain secara langsung atau tidak langsung. Literatur Munyati & Jaeni (2022) mendefinisikan penipuan sebagai penyalahgunaan aset yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau penyusunan data palsu, laporan keuangan yang tidak akurat. *Fraud* memiliki tiga jenis yaitu penimpangan aset, pernyataan palsu dan korupsi (ACFE, 2022)

Fraud dapat menyebabkan kerugian kepada banyak pihak, seperti masyarakat bahkan pemerintahan. Kerugian yang akan dirasakan mesyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kenaikan harga bahan pokok pada wilayah dimana pejabat melakukan penipuan. Hal itu juga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari *fraud* pada institusi pemerintah Raharja & Sulistyowati, (2023). Kecurangan terjadi Ketika mengalami tiga faktor ini: tekanan, yaitu ketika pelaku mengalami tagihan yang menumpuk, hutang, dan gaya hidup yang tinggi, atau bahkan tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian peluang, seperti kontrol internal yang lemah, pengawasan yang kurang, dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian rasionalisasi, dimana perspektif yang ditunjukkan oleh pelaku untuk mendukung perbuatan yang dia lakukan.

2.3 Pengendalian Internal

Pengendalian internal didefinisikan sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen, dewan direksi, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang cukup berhubungan dengan pencapaian tujuan yang relevan operasi, laporan, dan kepatuhan pada norma (COSO, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan semua lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengawasi operasi aktivitas pemerintahan, berbasis pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah untuk mendorong akselerasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014: Peningkatan Kualitas dan Keandalan Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Pengawasan Intern untuk Menjaga Kesejahteraan Populasi.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjalankan operasi, mulai dari rencana, melaksanakan, mengawasi, dan akhirnya bertanggung jawab dilakukan dengan cara yang teratur, terkontrol, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien melaporkan pengelolaan keuangan, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap undang-undang.

Unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri 8 sub unsur, yaitu :

- 1) penegakan integritas dan nilai etika; 2) komitmen terhadap kompetensi; 3) kepemimpinan yang kondusif; 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.4 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan menilai risiko yang mungkin. dapat mengurangi kerugian bisnis (Kwantingtyas, 2017). (Inspektorat Jendral, 2023) menyatakan dampak praktik *fraud* sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Studi Crockford (2005) membahas risiko sebagai konsekuensi perubahan. Artikel tersebut pertama kali diterbitkan di *Geneva Papers* pada tahun 1976. Mengatasi perubahan disebut manajemen risiko. Bisnis menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat karena tekanan manajemen risiko. Oleh karena itu, pimpinan instansi harus melakukan segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Penting untuk menerapkan berbagai kebijakan pengendalian *fraud* dalam struktur birokrasi pemerintah.

Secara teori, lima prinsip dasar atas manajemen risiko terhadap kecurangan (*fraud*) yaitu:

- a. Tata Kelola Risiko Penipuan (*Fraud Risk Governance*) Dalam hal ini, kebijakan tertulis yang berisi informasi tentang program dan kinerja mencantumkan manajemen risiko kecurangan;
- b. Penilaian Risiko Penipuan (*Fraud Risk Assessment*) Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan kemungkinan, jenis, dan biaya dari risiko kecurangan;
- c. Aktivitas Pengawasan Intern (*Fraud Control Activity*) Upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan;
- d. Investigasi Penipuan dan Tindakan Korektif (*Fraud Investigation and Corrective Action*) tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan risiko kemungkinan, biaya dari risiko kecurangan, dan jenis. Apabila melakukan pelanggaran maka harus diberikan sanksi yang tepat;
- e. Pemantauan Manajemen Risiko Penipuan (*Fraud Risk Management Monitoring Activities*) evaluasi sebagai langkah untuk meningkatkan deteksi kecurangan dan memberi tahu semua karyawan tentang hasil program manajemen risiko

kecurangan. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran setiap individu akan arti pentingnya anti kecurangan.

Area yang rentan terhadap kecurangan atau penyimpangan disebut sebagai area rawan *fraud*. Beberapa di antaranya adalah lembaga yang menangani pengelolaan keuangan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, penyediaan layanan publik, dan tugas lain. Sehingga tujuan organisasi terhambat, manajemen risiko pengendalian *fraud* sangat penting dalam industri yang rawan *fraud*. Implementasi dari manajemen risiko pencegahan *fraud* tentunya perlu didukung oleh para pimpinan instansi pemerintah atau disebut dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.5 Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian suatu Perusahaan dalam mencegah segala bentuk kecurangan. Pedoman dari *whistleblowing system* ini yaitu PSPP Peraturan Gubernur (Lampung, 2015) untuk mendorong partisipasi pegawai dan masyarakat di pemerintahan Provinsi Lampung dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pembangunan Zona Integritas dan Korupsi (TPK) menuju Zona Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Lampung.

Mekanisme pengaduan tindak pidana korupsi pemerintah Provinsi Lampung mencakup:

1. Dalam menerapkan pedoman ini, perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan. Tim ini akan bertanggung jawab untuk menangani dan mengelola pengaduan, yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur.
2. Dalam situasi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh dalam jangka waktu yang sangat singkat diyakini oleh profesional auditor sebagai informasi yang sah ditindaklanjuti setidaknya harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, and Where). pendapat profesional dimaksud adalah studi yang didasarkan pada data empiris kasus serupa dan atau berdasarkan bukti tambahan yang mendukung laporan atau pengaduan tertulis.

3. Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana tercantum pada Pasal 5, setiap whistleblower harus menyebutkan identitasnya (nama, alamat, dan nomor telepon) serta menyerahkan bukti pendukung.
4. Diupayakan untuk mengundang whistleblower jika hasil tela'ah memenuhi kriteria 3W (What, Where, When), dan whistleblower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi tambahan sebelum diterbitkan Surat Tugas

Dalam mencegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, *whistleblower* harus dilindungi. Dalam Peraturan Gubernur (Lampung, 2015) pasal 13 menyatakan Whistleblower yang melaporkan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat atau Pegawai Aparatur Sipil Negara menerima perlindungan kerahasiaan identitas. Sepanjang proses pembuktian dan pelaporan bukti tindak pidana Korupsi dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.6 Budaya Organisasi

Robbins dan Judge (2013) menemukan bahwa budaya organisasi memiliki kecenderungan untuk membentuk standar kerja yang tinggi di antara karyawan. Dengan demikian, jika budaya tersebut kuat dan mendukung standar kerja yang tinggi, kinerja karyawan akan meningkat. Jika kecurangan menjadi budaya, maka akan bertindak demi kepentingan mereka sendiri bukan untuk mencapai tujuan organisasi. Individu yang memiliki tingkat integritas tinggi tidak akan tergoda untuk melakukan penyelewengan dengan kewenangan yang dimiliki (Syahda & Nurhadianto, 2023). Studi menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk identitas organisasi dan meningkatkan komitmen organisasi Dharu & Wahidahwati, (2021).

Menurut Mangkunegara (2005), menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Dengan adanya organisasi yang sukses memiliki budaya yang kuat sehingga dapat menarik, memelihara dan mengimbali orang yang berhasil melaksanakan peranannya dalam mencapai tujuan.

Budaya ini mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi satu sama lain dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Ketika integritas sudah menjadi budaya sebuah organisasi, insentif untuk melakukan kecurangan akan berkurang. Karena ketika integritas menjadi bagian dari budaya maka orang lebih cenderung bertindak sesuai etika. Budaya organisasi merupakan hal penting untuk memahami bagaimana prinsip dan praktik suatu organisasi dapat memengaruhi tindakan individu dan kelompok. Mengembangkan budaya organisasi yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah kecurangan di pemerintahan. Pemerintah dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik dengan mempromosikan prinsip etis dan menciptakan lingkungan yang mendukung.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

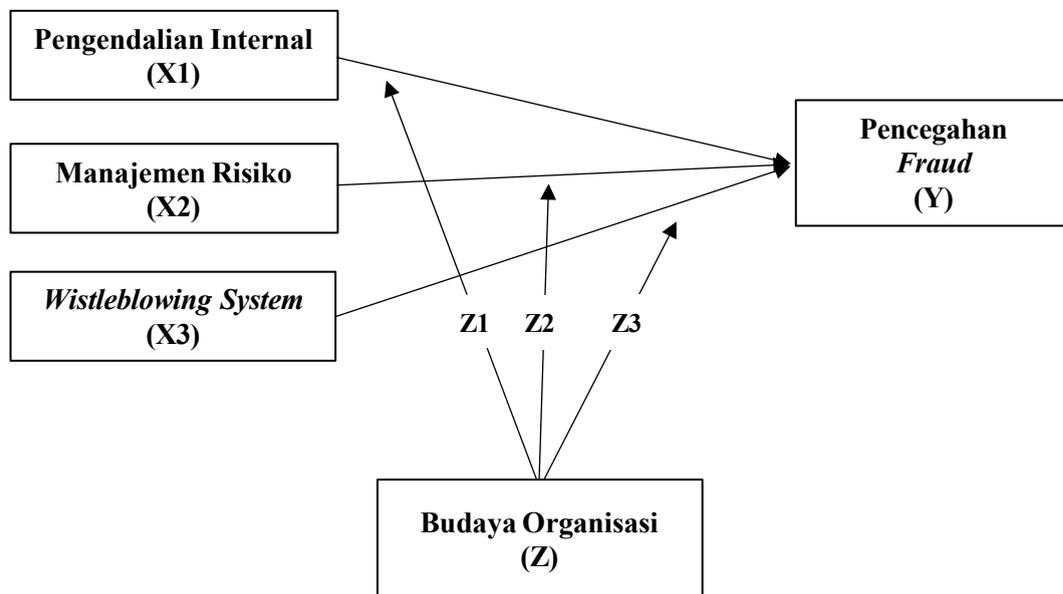
No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Agus Sulistiyo, 2022) Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Independen: 1. Pengendalian Internal 2. Manajemen Risiko 3. <i>Whistleblowing System</i> Dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Pemerintahan Kabupaten Samosir	Variable Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Manajemen berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .
2	Arpani et al., (2022) Pengaruh <i>whistleblowing system</i> , kompetensi aparatur	Independent: 1. <i>Whistleblowing system</i>	Variable <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sedangkan variable

	dan kesadaran anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (studi empiris pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau)	2. Kompetensi aparatur 3. Kesadaran anti kecurangan Dependen: Pencegahan kecurangan	kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sedangkan variable kesadaran anti <i>fraud</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
3	(Mukoffi et al., 2023) Pengaruh Budaya Organisasi, Audit Internal, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada BKAD PEMKOT Batu	Independent: 1. Budaya organisasi 2. Audit internal 3. Pengendalian internal Dependen: Pencegahan kecurangan	Variable Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan variable pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
4	Armelia & Wahyuni, (2020) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Independent: 1. Kompetensi aparatur desa 2. Efektivitas pengendalian internal 3. Moral sensitivity Dependen: Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa	Variable kompetensi apatarur desa tidak berpengaruh terhadap penvegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variable efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap penvegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variable moral sensitivity berpengaruh terhadap penvegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
5	(Azhar et al., 2024) Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .	Independent: 1. <i>Whistleblowing System</i> 2. Pengendalian Internal Dependen: Pencegahan fraud	Variable <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Sedangkan pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
6	(Melinda et al., 2023) Pengaruh Budaya Organisasi,	Independent: 1. Budaya Organisasi	Variabeldel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap

	Pengendalian Internal, <i>Proactive Fraud Audit</i> , dan <i>Whistleblowing System</i> Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana BOS	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengendalian Internal 3. <i>Proactive Fraud Audit</i>. 4. <i>Whistleblowing System</i> <p>Dependen: Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS</p>	<p>pencegahan <i>fraud</i>. Sedangkan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>. Sedangkan variable <i>Proactive Fraud Audit</i> berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan <i>fraud</i>. Sedangkan variable <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan <i>fraud</i>.</p>
7	(Ilmi & Suhartini, 2024) Pencegahan Tindakan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi	<p>Independent: 1. Budaya Organisasi</p> <p>Dependent: 1. Pencegahan Tindakan kecurangan (<i>Fraud</i>)</p>	<p>Variable budaya organisasi mampu memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).</p>

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*, variabel independen yaitu pengendalian internal, manajemen risiko, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi sebagai variable moderasi. Adapun hasil uraian tersebut maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal adalah kumpulan aturan dan peraturan yang digunakan untuk menjalankan proses tertentu dalam organisasi. Studi menunjukkan bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan dalam mencegah penipuan. Pengendalian internal memengaruhi antisipasi penipuan. Kesalahan dapat dihindari dengan kontrol internal.

Pengendalian internal merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, seperti efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum, dan pelaporan keuangan yang akurat. Studi menunjukkan bahwa sistem kontrol internal yang baik dapat mencegah dan menemukan kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah. Misalnya, Habibullah et al. (2024) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif membantu mencegah penipuan dengan mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang dimanipulasi. Pengendalian internal terbukti dapat menghentikan fraud. Hasil dari penelitian

(Agus Sulistiyo, 2022) (Dharu & Wahidahwati, 2021), (Rizqia & Widajantie, 2022), (Rahman, 2020), (Rohimah & Anna, 2019), (Armelia & Wahyuni, 2020).

Loyalitas dari aparatur ditentukan oleh budaya organisasi. Jika kecurangan menjadi budaya, maka aparatur bisa dikatakan kurang loyal atau sama sekali tidak akan loyal terhadap organisasi tersebut. Oleh sebab itu aparatur akan bertindak demi kepentingan mereka sendiri bukan untuk mencapai tujuan organisasi. Studi menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk identitas organisasi dan meningkatkan komitmen organisasi. Studi menunjukkan bahwa pengendalian internal dipengaruhi oleh budaya organisasi (Dharu & Wahidahwati, 2021) (Duma et al., 2023). Mencegah penipuan dalam pemerintahan, sinergi antara budaya organisasi dan pengendalian internal sangat penting. Penguatan sistem pengendalian internal harus diimbangi dengan membangun budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih baik menjaga pengelolaan keuangan publik tetap bersih. Berdasarkan teori agency dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ini dapat dibuat:

H₁ : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

H₂ : Budaya organisasi memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

2.9.2 Manajemen Risiko, Budaya Organisasi, Pencegahan *Fraud*

Manajemen risiko sangat membantu mencegah penipuan di sektor pemerintahan. Mengidentifikasi, mengukur, dan menilai risiko yang mungkin terjadi adalah tindakan atau proses yang dikenal sebagai manajemen risiko, hal ini tentu dapat mengurangi kerugian bisnis (Kwantingtyas, 2017).

Cara untuk menangani risiko, menurut teori manajemen risiko, seperti: 1) mengurangi risiko, misalnya dengan memutuskan untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan bahaya; 2) mengurangi risiko, dengan kata lain mengurangi kemungkinan terjadi dan mengurangi dampak atau efeknya; 3)

memindahkan risiko, yaitu memberi risiko kepada pihak lain untuk mengambil risiko; 4) mengambil risiko, artinya tidak melakukan apa-apa atas kompensasi risiko yang diperlukan; dan 5) mengambil risiko, yaitu mengambil tindakan untuk mengambil risiko pilihan lain yang dihasilkan dari keputusan yang dibuat secara proaktif dan dilakukan dengan niat untuk mendapatkan bahaya baru karena memiliki area yang lebih terang (Prasetyo Dwi, 2022).

Salah satu tujuan dari manajemen risiko sektor pemerintahan adalah untuk membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Studi menunjukkan bahwa banyak kasus fraud pemerintah daerah disebabkan oleh kekurangan pengendalian internal. Misalnya, laporan Amri dan Putri (2024) menunjukkan bahwa hampir 50% kasus fraud melibatkan entitas pemerintah, dan kekurangan pengendalian internal berkontribusi besar pada masalah ini (Amri & Putri, 2024). Berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan (Agus Sulistiyo, 2022), (Susiloningtyas et al., 2023) (Sudarmanto Eko, 2020) Menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada pemerintahan .

Filosofi, prinsip, dan kebiasaan yang ada di dalam suatu organisasi disebut sebagai budaya organisasi. Untuk menghindari penipuan, budaya yang mendukung integritas dan etika sangat penting. Dalam pemerintahan, budaya organisasi yang kuat dapat membantu membuat lingkungan kerja di mana karyawan merasa bertanggung jawab untuk melaporkan kecurangan dan menghindari pelanggaran. Rahman (2020) menemukan bahwa budaya organisasi yang baik mengurangi penipuan dengan memberi pegawai kesadaran tentang pentingnya integritas (Safitri et al., 2024). Dari teori agency dan penelitian terdahulu maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

H₄ : Budaya organisasi memoderasi hubungan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud*

2.9.3 Whistleblowing System, Budaya Organisasi, Pencegahan Fraud

Individu dapat menggunakan sistem *whistleblowing* untuk melaporkan dugaan fraud atau pelanggaran lainnya kepada pihak berwenang tanpa khawatir tentang akibatnya. Dengan sistem *whistleblowing* yang baik, individu dapat dimotivasi untuk melaporkan *fraud* dan membantu organisasi mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan secara dini (Widyawati et al., 2023). *Whistleblowing* adalah metode yang memungkinkan karyawan atau individu untuk melaporkan tindakan yang melanggar hukum, tidak etis, atau merugikan tanpa khawatir akan dihukum.

Studi menunjukkan bahwa sistem ini dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah kecurangan karena memberi pelapor sarana untuk mengungkapkan kecurangan yang mungkin terjadi di dalam organisasi. Menurut Anlilua dan Rusmita (023), sistem *whistleblowing* dapat mengurangi fraud karena meningkatkan kejujuran dan keterbukaan di kantor pemerintah (Anlilua et al., 2023). Menurut penelitian (Agus Sulistiyo, 2022), (Kuswati, 2023), (Melinda et al., 2023), (Arpani et al., 2022), (Widyawati et al., 2023) *Whistleblowing System* ini berdampak positif serta signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Nilai-nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh suatu organisasi membentuk budaya organisasi. Untuk mencegah penipuan, budaya yang mendukung etika dan integritas sangat penting. Sebuah penelitian oleh Jeandry dan Mokoginta (2021) menemukan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat memengaruhi bagaimana karyawan memperlakukan pelaporan kecurangan. Budaya organisasi yang kuat membuat karyawan lebih sering menggunakan sistem *whistleblowing* (Anlilua et al., 2023). Pegawai lebih cenderung melaporkan tindakan curang ketika mereka bekerja dalam lingkungan yang mendukung keterbukaan dan kejujuran. Menurut penelitian (Duma et al., 2023), (Raharja & Sulistyowati, 2023). Maka, berdasarkan penelitian terdahulu ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

H₆ : Budaya organisasi memoderasi hubungan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*